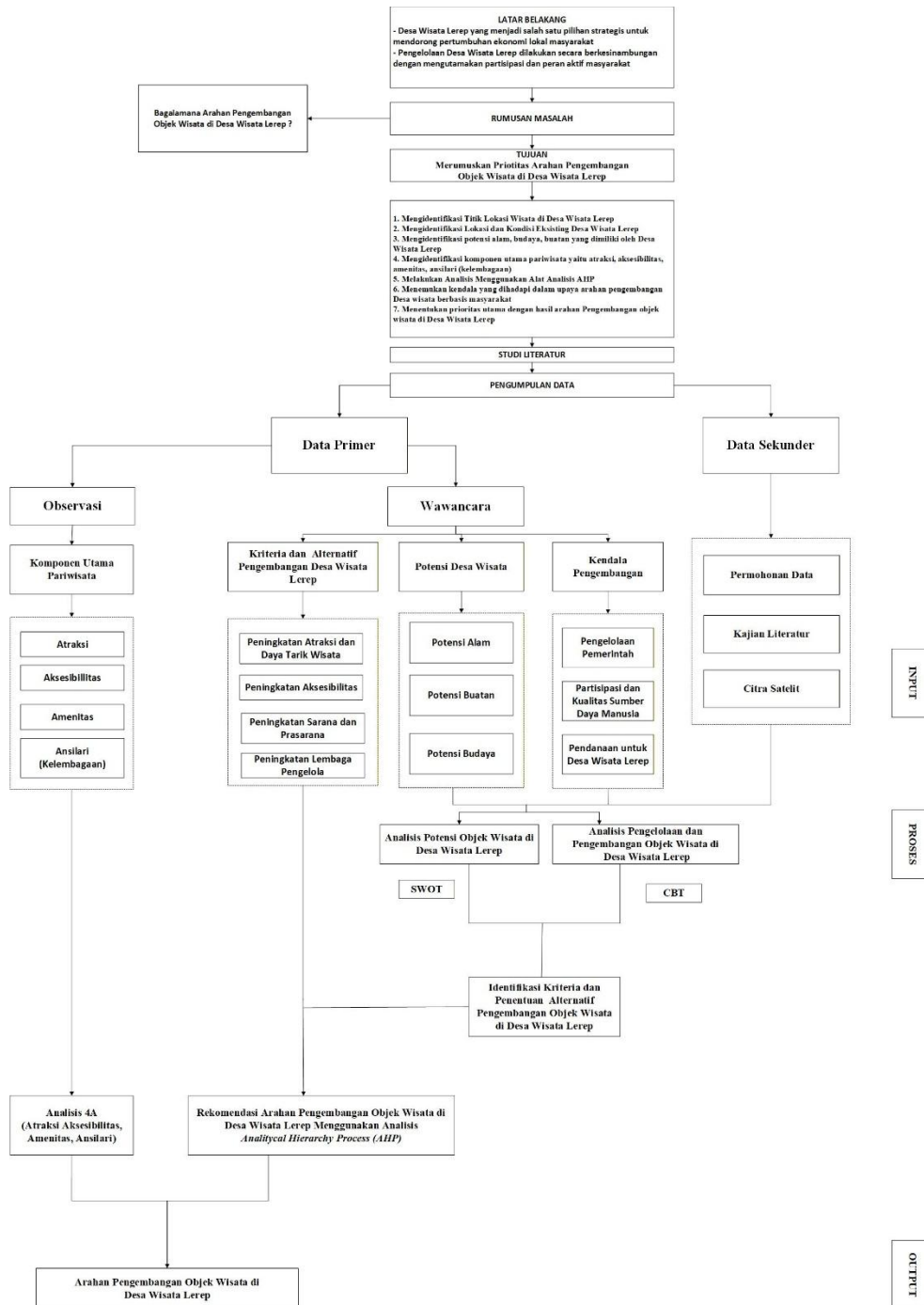


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN

2.1 Konsep Perencanaan

Desa Wisata Lerep memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan kekayaan alam yang melimpah, keunikan budaya, serta kearifan lokal yang masih terjaga, Desa ini menjadi salah satu lokasi strategis untuk dikembangkan melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pengelolaan Desa Wisata Lerep dilakukan secara berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapannya. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi pengembangan Desa wisata. Dengan menerapkan prinsip CBT, pengembangan tidak hanya berfokus pada peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga pada pemberdayaan Desa. Desa Wisata Lerep memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan kekayaan alam yang melimpah, keunikan budaya, serta kearifan lokal yang masih terjaga, Desa ini menjadi salah satu lokasi strategis untuk dikembangkan melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pengelolaan Desa Wisata Lerep dilakukan secara berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapannya. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi pengembangan Desa wisata. Dengan menerapkan prinsip CBT, pengembangan tidak hanya berfokus pada peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki peran aktif dalam pembangunan Desa wisata, pemberdayaan masyarakat agar memiliki peran aktif dalam pembangunan Desa wisata. Berikut merupakan kerangka pemikiran dan penelitian tugas akhir:



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan

2.2 Dasar Teori Konsep Perencanaan

2.2.1 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan suatu wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pariwisata yang didukung oleh keberadaan daya tarik wisata, aksesibilitas, serta sarana dan prasarana penunjang yang terintegrasi. Konsep kawasan pariwisata tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan objek wisata, tetapi

juga mencakup sistem pendukung yang mampu menciptakan pengalaman wisata secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Definisi ini menegaskan bahwa kawasan pariwisata memiliki batas spasial yang jelas serta direncanakan secara khusus untuk mendukung aktivitas wisata. (Undang Undang Republik Indonesia, 2009).

2.2.2 Definisi Pariwisata

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam aktivitas wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang Undang Republik Indonesia, 2009). Pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang ke luar tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lain yang berlangsung lebih dari satu hari, namun tidak melebihi masa tinggal yang ditetapkan, serta termasuk segala aktivitas yang dilakukan selama berada di tujuan tersebut (Suwandi et al., 2023). Dalam konteks yang lebih luas, pariwisata tidak hanya mencakup aspek perjalanan itu sendiri, tetapi juga mencakup dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di destinasi yang dikunjungi (Siregar et al., 2024). Definisi ini mencerminkan hubungan kegiatan pariwisata yang melibatkan interaksi antara pengunjung, masyarakat lokal, dan lingkungan tempat wisata itu berada.

2.2.3 Definisi Desa Wisata

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya (Peraturan Menteri Pariwisata, 2016). Desa Wisata merupakan wilayah tertentu yang memiliki keunikan dan daya tarik wisata khas, serta didukung oleh komunitas masyarakat yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi atraksi dan fasilitas penunjang untuk menarik kunjungan wisatawan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Selain itu, keberadaan layanan pendukung seperti tempat penukaran uang asing dan fasilitas telekomunikasi akan meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Ketiga faktor ini saling melengkapi dan berperan penting

dalam meningkatkan daya tarik serta keberlanjutan suatu daerah sebagai destinasi wisata unggulan (Putra, 2006).

2.2.4 Community Based Tourism

Community Based Tourism (CBT) adalah pendekatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan Desa wisata. Konsep ini menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam seluruh proses pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan langsung ini, masyarakat tidak hanya menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Pendekatan CBT memastikan bahwa pariwisata tidak hanya sekadar industri, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat identitas lokal (H. Setiawan, 2022). Salah satu alasan mengapa *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi lokal, baik dari aspek sumber daya alam maupun budaya. Melalui program pemberdayaan yang terstruktur, seperti pelatihan keterampilan dan edukasi, masyarakat dibekali dengan pengetahuan serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Menurut (Suansri, 2003) mengemukakan *Community Based Tourism* merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata didalamnya ada 10 (sepuluh) prinsip dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*, antara lain:

1. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata.
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek.
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas.
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas.
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan.
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal.
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas.
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas.
10. Berperan dalam menentukan presentase pendapatan.

CBT tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menekankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga CBT dipandang melalui lima dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi

- a. CBT harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, usaha mikro, dan distribusi manfaat yang adil.
- b. Prinsipnya adalah kemandirian ekonomi desa melalui kepemilikan dan pengelolaan aset wisata oleh masyarakat.

2. Dimensi Sosial

- a. CBT memperkuat kohesi sosial, partisipasi, dan solidaritas antarwarga.
- b. Memperluas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

3. Dimensi Budaya

- a. CBT berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas, nilai, tradisi, dan kesenian lokal.
- b. Budaya tidak hanya menjadi komoditas pariwisata, tetapi juga warisan yang dihargai dan dijaga keberlanjutannya.

4. Dimensi Lingkungan

- a. CBT harus menjaga keberlanjutan ekologi melalui perlindungan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak.
- b. Alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, tetapi dijaga agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

5. Dimensi Politik

- a. Masyarakat memiliki keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan desa wisata.
- b. Adanya prinsip transparansi, keadilan, serta rasa memiliki sehingga masyarakat memiliki kendali terhadap arah pengembangan pariwisata.

Pemilihan *Community-Based Tourism* (CBT) sebagai tema dalam penelitian ini didasarkan pada urgensi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi. Model ini selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana pariwisata harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan

budaya bagi masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan (Undang Undang Republik Indonesia, 2009).

2.2.5 SWOT

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal Perusahaan. Faktor internal yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan Perusahaan dan faktor eksternal yaitu mengetahui peluang dan tantangan pada Desa Wisata Lerep. Analisis SWOT selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Strategis Kemenparekraf, yang menekankan evaluasi potensi dan tantangan dalam pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks Desa Wisata Lerep, SWOT menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi potensi wisata, hambatan, serta peluang guna memperkuat daya saing Desa. Dengan analisis faktor internal dan eksternal yang komprehensif, SWOT menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan berdasarkan konsep *Community-Based Tourism* (CBT), memastikan bahwa pengelolaan wisata tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

2.2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki (Saaty, 2008). Pemilihan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode analisis dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya dalam membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan multi-kriteria. AHP memungkinkan pembobotan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata Lerep secara sistematis, sehingga menghasilkan prioritas strategi yang lebih objektif dan berbasis data. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis kuantitatif, AHP dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dalam menentukan strategi pengembangan Desa Wisata Lerep, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal, serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.